



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi *stakeholder* suatu perusahaan. Perusahaan menyusun laporan keuangan dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan perubahan posisi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, baik oleh internal maupun eksternal. Internal perusahaan, pihak yang menyusun laporan keuangan, sebagai yang paling memahami kondisi perusahaan. Dari sisi eksternal seperti investor, laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan saat ingin berinvestasi. Pihak internal dan eksternal mengharapkan keuntungan diinformasikan dengan jelas di dalam laporan keuangan. Menurut Arens, *et al* (2017), terdapat informasi yang berisiko dalam kondisi ini karena pihak eksternal menghadapi keterbatasan informasi (*remoteness of information*). Pihak eksternal sangat sulit untuk mendapatkan informasi secara langsung. Informasi yang didapatkan dari satu pihak ke pihak lain akan semakin meningkatkan kemungkinan bahwa informasi tersebut menjadi tidak tepat baik disengaja maupun tidak disengaja. Arens, *et al* (2017) menambahkan, pihak eksternal juga akan menghadapi motif dan informasi yang bias. Internal akan “mempercantik” laporan keuangan agar eksternal tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaannya. Karena adanya keterbatasan dalam memperoleh data dan fakta, serta adanya perbedaan kepentingan tersebut, pihak eksternal membutuhkan peran pihak

independen yang dapat meningkatkan keyakinan mereka dalam setiap keputusan yang mereka ambil melalui penilaian atas keandalan dan kesesuaian dari laporan keuangan yang disajikan. Pihak independen yang dapat memberikan jasa tersebut adalah Akuntan Publik.

Belum lama ini, industri jasa audit sedang ramai diperbincangkan karena terjadi kasus yang mengarah pada independensi dari auditor tersebut. Setidaknya terdapat dua kasus yang telah terjadi. Kasus pertama adalah kegagalan audit yang dilakukan oleh dua Akuntan Publik, Marlinna dan Merliyana, dari Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (Deloitte Indonesia). Kontan.co.id (2018) menyebutkan pada kasus ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada dua Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh *Deloitte* Indonesia terkait dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*) tahun buku 2012 hingga 2016.

Menurut Kontan.co.id (2018), berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) terhadap Deloitte Indonesia dan Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul, KAP dan kedua Akuntan Publik tersebut belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit – Standar Profesional Akuntan Publik (SA – SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan *SNP Finance*. Kelalaian yang dilakukan kedua Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut adalah:

- a. Belum dipenuhinya pemahaman pengendalian atas sistem informasi data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan.
- b. Belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen.
- c. Belum adanya kewajaran dari asersi keterjadian dan asersi pisah batas (*cut-off*) akun pendapatan pembiayaan.
- d. Belum adanya pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan.
- e. Kurangnya respons atas risiko kecurangan.
- f. Kurangnya skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.
- g. Kurangnya pengendalian mutu oleh Kantor Akuntan Publik untuk mencegah ancaman kedekatan karena keterikatan yang cukup lama antara personil senior dengan klien yang sama untuk suatu periode tertentu sehingga terjadi penurunan skeptisisme profesional.

Dari hasil pemeriksaan PPPK tersebut menggambarkan penurunan independensi auditor dimata publik. Kedua Akuntan Publik tersebut belum menerapkan skeptisisme profesionalnya dalam merencanakan dan melaksanakan perikatan audit. Kedua auditor tersebut juga belum melaksanakan perikatan audit sesuai dengan Standar Audit yang berlaku. Kedua Akuntan Publik tersebut belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam membuat pertimbangan profesional. Hal ini menunjukkan kelalaian Akuntan Publik dalam mematuhi ketentuan independensi yang diatur di dalam Standar Audit 200. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2017), dalam Standar Audit (SA) 200

disebutkan bahwa auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi, yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi adalah:

a. Skeptisisme profesional

Sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan-kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.

b. Pertimbangan profesional

Penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks Standar Audit, akuntansi, dan etika, dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit.

c. Bukti audit yang cukup dan tepat

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat agar mampu menekan angka risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima.

d. Pelaksanaan audit berdasarkan Standar Audit

Auditor harus mematuhi seluruh Standar Audit yang relevan dengan audit. Suatu Standar Audit dikatakan relevan dengan audit jika Standar Audit tersebut berlaku dan terdapat hal-hal yang diatur dalam Standar Audit tersebut.

Berdasarkan artikel tersebut di dalam kasus ini terdapat kelemahan pada independensi penampilan Akuntan Publik. Hal ini dapat dilihat dari adanya

kelemahan terkait masa perikatan audit antara Akuntan Publik dengan klien. Diketahui dari hasil penyelidikan PPPK, Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul telah melakukan perikatan audit untuk tahun buku 2012-2016 atau selama 5 tahun berturut-turut dengan SNP *Finance*. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, yang di mana disebutkan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Pembatasan tersebut juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi. Pihak Terasosiasi adalah Rekan KAP yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai KAP yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk mencegah ancaman yang disebutkan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2018) yaitu suatu ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama dengan klien atau pemberi kerja, Akuntan Publik menjadi terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau kepentingan entitas pemberi kerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka.

Ancaman kedekatan ini akan mengancam independensi penampilan dari seorang auditor karena berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2018), independensi penampilan auditor merupakan suatu sikap menghindari fakta-fakta dan keadaan yang membuat pihak ketiga dapat menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari seorang auditor telah berkurang. Berdasarkan kasus pertama, dapat disimpulkan bahwa Akuntan Publik yang bertugas lalai dan tidak profesional terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik

yang berlaku dalam menjalankan tugas perikatannya. Selain itu, Akuntan Publik telah melakukan perikatan melebihi batas waktu perikatan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan klien yang sama sehingga muncul ancaman kedekatan hubungan. Kegagalan pencegahan ancaman kedekatan yang terjadi karena perikatan yang terlalu lama ini dapat menyebabkan penurunan skeptisisme profesional pada Akuntan Publik. Karena independensi penampilan merupakan sikap akuntan publik untuk menghindari fakta-fakta yang dapat menyimpulkan pihak ketiga meragukan dari integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional Akuntan Publik, maka penurunan skeptisisme profesional ini menyebabkan independensi penampilan auditor pun turut menurun.

Pelanggaran yang dilakukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik seperti yang terjadi pada Deloitte Indonesia pun ke depannya dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kompetensi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. Seperti yang dialami pada kasus kedua yaitu Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (BDO Indonesia) yang belum lama ini terjerat kasus terkait permasalahan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun buku 2018. Dalam kasus tersebut dijelaskan kesalahan yang dilakukan BDO Indonesia adalah:

- a. Akuntan Publik yang bertugas belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan-kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Akuntan Publik telah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan.

- b. Akuntan Publik juga belum memperoleh bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut.
- c. Akuntan Publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi.

Akibat dari kasus tersebut, berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com (2020), secara nyata BDO Internasional yang merupakan Kantor Akuntan Publik *Big 10* global (big4accountingfirms.org, 2020) mendapat cap buruk dari para *stakeholder*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perikatan audit, penting bagi auditor untuk menjaga sikap skeptisisme profesionalnya. Banyak hal yang harus dipertanyakan dan diwaspadai oleh auditor sebagai bentuk respons atas deteksi risiko kecurangan. Auditor juga harus mengedepankan kompetensi dan sikap profesionalnya dalam melaksanakan setiap perikatan audit dengan cara melaksanakan perikatan audit sesuai dengan SPAP dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlaku. Dengan terjaganya sikap dari auditor ini akan menjauhkan pemikiran pihak ketiga yang meragukan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional dari auditor tersebut sehingga independensi penampilan auditor tetap terjaga.

Dari kasus yang terjadi pada BDO dan Deloitte Indonesia tersebut dapat disimpulkan bahwa keahlian teknis harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Auditor juga harus profesional dalam melayani kepentingan umum bukan kepentingan untuk pihak-pihak tertentu saja. Selain itu, Akuntan Publik harus mengikuti peraturan yang berlaku selama melakukan perikatan audit. Apabila Akuntan Publik selalu bertugas dengan mengandalkan

seluruh keahlian teknisnya dan selalu profesional dalam setiap perikatan audit, maka sikap integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional Akuntan Publik akan senantiasa terbangun. Dengan terbangunnya sikap tersebut dalam setiap perikatan audit akan menjauhkan pemikiran pihak ketiga yang meragukan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional dari Akuntan Publik tersebut, sehingga independensi penampilan auditor akan meningkat. Maka dari itu sangat penting bagi Akuntan Publik untuk menghindari faktor-faktor yang dapat memengaruhi independensi penampilannya.

Auditor dipercaya pengguna laporan keuangan sebagai pihak independen yang bertugas memberikan jasa untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan apakah laporan keuangan perusahaan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria dan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan auditor memeriksa laporan keuangan perusahaan adalah untuk memberikan penilaian apakah laporan keuangan disajikan secara wajar yang di mana hasil penilaian tersebut dinyatakan dalam sebuah opini. Whittington (2016) memperjelas tujuan dari sebuah audit adalah untuk memberikan opini kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Opini auditor meningkatkan derajat keyakinan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Karena pekerjaan auditor mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka auditor harus mengedepankan independensi dalam setiap perikatan audit yang dijalannya.

Sikap independensi harus ada di dalam diri seorang auditor. Seorang auditor secara intelektual harus jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai satu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Setiap akuntan publik yang memberikan jasa asuransi harus objektif dan tidak memihak kepada kepentingan klien. Institut Akuntan Publik Indonesia (2018) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik menyebutkan independensi dibagi menjadi dua jenis:

- a. Independensi pemikiran; sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak dengan berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional;
- b. Independensi penampilan; penghindaran fakta-fakta dan keadaan yang sangat signifikan yang dapat membuat pihak ketiga menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu kantor atau personil dari tim audit atau tim asuransi telah berkurang.

Dalam melaksanakan perikatan audit, auditor harus memiliki independensi penampilan yaitu penghindaran fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dapat membuat pihak ketiga meragukan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesionalnya yaitu dengan bersikap objektif, berkompeten, menjaga sikap *due care*, etika, dan integritas serta bersikap profesional sesuai SPAP dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik.

Auditor harus independen dalam setiap perikatan auditnya. Selain mempertahankan sikap mental untuk tidak terpengaruh tekanan dari pihak lain, dalam menyatakan opini audit seorang auditor juga harus menghindari faktor-faktor, keadaan-keadaan, serta fakta-fakta yang dapat mengakibatkan pihak ketiga yang menggunakan laporan keuangan meragukan objektivitas, profesionalisme, dan skeptisisme profesional dari auditor tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena audit dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengambil keputusan dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Banyak hal yang dapat memengaruhi independensi penampilan auditor, salah satunya adalah ikatan kepentingan keuangan. Ikatan kepentingan keuangan merupakan suatu bentuk perikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian kerja sama usaha dan juga terdapat nilai uang di dalamnya. Beberapa bentuk usaha dan kerja sama yang dapat terjadi adalah Kantor Akuntan Publik tempat auditor bekerja memiliki hubungan investasi dengan klien yang sedang ditangani auditor, klien memiliki hubungan utang piutang dengan Kantor Akuntan Publik tempat auditor bekerja, hubungan kepemilikan saham klien yang dimiliki oleh satu atau lebih partner dari Kantor Akuntan Publik tempat auditor bekerja, auditor memiliki kedudukan penting pada kantor klien, dan juga auditor mengaudit perusahaan debitur bank di mana Kantor Akuntan Publik tempat auditor bekerja memiliki saham pada bank tersebut. Menurut Laurensius (2016), apabila seorang auditor mempunyai kepentingan keuangan pada auditan sebelum memulai pekerjaan penugasan, biasanya auditor akan menjual saham auditan yang dimilikinya sebelum memulai penugasan, guna menjaga jangan sampai independensi menjadi lemah.

Hal itu disebabkan karena penghapusan kepentingan keuangan sebelum memulai pekerjaan audit akan mampu menghilangkan bias atau melemahnya objektivitas yang berkaitan dengan kepentingan keuangan.

Selama melaksanakan perikatan audit, auditor harus menghindari ikatan kepentingan keuangan dengan kliennya. Bentuk ikatan kepentingan keuangan tersebut dapat berupa hubungan usaha, hubungan investasi, hubungan utang piutang yang besar yang cukup besar, hubungan kepemilikan saham, dan peran Akuntan Publik dalam perusahaan klien sebagai karyawan dengan jabatan penting. Ikatan kepentingan keuangan harus dihindari oleh auditor untuk menjauhi pengaruh pihak lain terhadap auditor sehingga objektivitas auditor tetap terjaga. Dengan menjauhi ikatan kepentingan keuangan selama melaksanakan perikatan audit menunjukkan bahwa auditor melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesional dan kode etik yang berlaku sehingga profesionalitas dari auditor tetap terjaga. Dengan menghindari ikatan kepentingan keuangan menunjukkan bahwa auditor harus melaksanakan perikatan audit dengan jujur, serta auditor sadar bahwa ia harus profesional dalam melayani kepentingan bersama karena auditor dipercaya masyarakat untuk melaksanakan jasa audit tersebut. Dengan semakin menghindari ikatan kepentingan keuangan selama perikatan audit akan menjauhkan pemikiran pihak ketiga yang meragukan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional auditor tersebut sehingga independensi penampilan auditor tersebut semakin meningkat. Maka dari itu dengan semakin rendahnya ikatan kepentingan keuangan auditor dengan klien akan membuat independensi penampilan auditor semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Soegiastuti (2015), Laurensius

(2016), dan Darmayanthi (2017) menyatakan bahwa ikatan kepentingan keuangan berpengaruh negatif pada independensi penampilan auditor.

Selain ikatan kepentingan keuangan, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi independensi penampilan auditor, beberapa di antaranya adalah pemberian jasa lain selain audit, etika profesi, kompetisi antar KAP, dan audit *fee*. Menurut Halim (2015) jasa yang dapat diberikan Kantor Akuntan Publik di antaranya jasa attestasi dan non attestasi. Jasa attestasi meliputi jasa audit atas laporan keuangan historis pemeriksaan dan penelaahan. Jasa non attestasi meliputi jasa-jasa bersifat administratif, jasa penilaian, jasa sistem teknologi informasi, jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa akuntansi manajemen. Kantor akuntan tidak diperkenankan untuk memberikan jasa lain selain audit kepada klien yang sama saat periode audit sedang berlangsung. Menurut Aditama (2015), pemberian jasa lain selain audit tidak boleh dilakukan kepada klien yang sama selama perikatan audit karena kantor akuntan pemberi jasa akan memberikan saran-saran manajemen yang cenderung memihak kepada kepentingan kliennya sehingga memberikan jasa lain selain audit akan menghilangkan objektivitas auditor dari kantor akuntan pemberi jasa dalam pelaksanaan tugas auditnya. Kantor akuntan merasa bahwa dengan memberikan jasa lain selain audit membuat keberhasilan kliennya menjadi prioritasnya, sehingga kantor akuntan akan mengusahakan segalanya yang membuat kantor akuntan menjadi cenderung tidak independen saat melaksanakan tugas audit dalam periode waktu yang sama. Pemberian jasa selain audit mungkin mengharuskan kantor akuntan membuat keputusan tertentu untuk kliennya sehingga posisi akuntan publik menjadi tidak independen di dalam melaksanakan

tugas audit dan kantor akuntan publik yang melaksanakan pemberian jasa selain audit mungkin mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manajemen klien sehingga kemungkinan kurang independen di dalam melaksanakan tugas audit.

Akuntan Publik dapat memberikan jasa lain selain audit seperti jasa konsultasi manajemen, konsultasi perpajakan, dan administrasi pembukuan. Dalam memberikan jasa-jasa tersebut, Akuntan Publik akan memberikannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku, seperti tidak memberikannya bersamaan dengan penugasan klien audit karena dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam memeriksa laporan keuangan. Auditor sadar bahwa ia harus bersikap jujur dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mengikuti SPAP dan Kode Etik dalam pelaksanaan tugas auditnya menunjukkan suatu bentuk sikap kehati-hatian dari seorang auditor. Maka dengan semakin meningkatnya pemberian jasa lain selain audit, auditor akan melaksanakannya sesuai dengan standar profesional yang berlaku sehingga menjauhkan pemikiran pihak ketiga yang meragukan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional dari auditor tersebut. Maka dengan semakin meningkatnya pemberian jasa lain selain audit, maka independensi penampilan auditor akan semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nida (2014), Laurensius (2016), Soegiastuti (2015), Paramastri (2016) dijelaskan bahwa pemberian jasa selain audit berpengaruh negatif pada independensi auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi independensi penampilan auditor adalah pemahaman dan pelaksanaan etika profesi seorang auditor. Menurut Darmayanthi dan Gede (2017), etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai

moral yang dimiliki oleh setiap orang. Etika berkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang memandu perilaku manusia. Etika merupakan pembelajaran tentang norma-norma dan nilai-nilai yang berkaitan dengan salah dan benar, baik dan buruk, apa yang harus kita lakukan dan tindakan apa yang dihindari. Tidak seperti keputusan yang jelas, dilema etika tidak memiliki standar objektif. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kode etik yang bersifat objektif.

Auditor melaksanakan tugas perikatannya dengan menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Auditor akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dengan berperilaku dan bersikap sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, auditor akan semakin meningkatkan kompetensi dan sikap *due care* selama perikatan audit. Auditor juga akan semakin profesional karena menaati standar akuntan publik yang berlaku, dan juga akan semakin berintegritas karena bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya. Auditor juga akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku terhadap auditan. Auditor akan menjauhi pengaruh dari pihak lain sehingga akan semakin objektif. Auditor juga akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku terhadap masyarakat. Auditor sadar bahwa ia diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengaudit laporan keuangan klien, sehingga ia harus bersikap profesional dalam melayani kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu. Dengan semakin meningkatkan etika profesi dalam perikatan audit, auditor akan semakin meningkatkan sikap objektivitas, profesionalitas, kompetensi, *due care*, dan integritas. Dengan semakin meningkatnya sikap objektivitas, profesionalitas,

kompetensi, *due care*, dan integritas akan semakin menjauhi pemikiran pihak ketiga yang meragukan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional dari seorang auditor sehingga independensi penampilan auditor akan semakin meningkat. Hasil penelitian Darmayanthi (2017) menunjukkan pemahaman etika berpengaruh positif terhadap independensi penampilan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi independensi penampilan auditor adalah kompetisi antar Kantor Akuntan Publik. Semakin meningkatnya persaingan antar KAP terjadi karena jumlah anggota profesi auditor yang terus bertambah. Semakin tingginya tingkat kompetisi antar KAP akan membuat usaha KAP untuk mendapatkan klien baru dan mempertahankan klien yang ada menjadi semakin tinggi. Kompetisi yang tajam antar KAP merupakan hal biasa. Dengan adanya kompetisi ini, Kantor Akuntan Publik akan meningkatkan citra kantor kepada publik dengan cara meningkatkan objektivitas dan profesionalitasnya. Kantor Akuntan Publik akan menjauhi kondisi-kondisi yang dapat mengancam independensinya. KAP akan mempekerjakan auditor yang memiliki tingkat keahlian tinggi. KAP juga akan bersikap jujur dan profesional dalam memberikan jasanya sehingga semakin meningkatkan sikap kehati-hatiannya karena tugas tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan untuk melayani kepentingan umum. Maka dengan semakin meningkatnya kompetisi antar KAP auditor akan semakin menjauhi sikap-sikap, kondisi-kondisi, serta fakta-fakta yang dapat memengaruhi pemikiran pihak ketiga yang meragukan objektivitas, profesionalitas, dan skeptisisme profesional dari auditor serta Kantor Akuntan Publik tersebut sehingga independensi penampilan auditor akan semakin meningkat. Berdasarkan

hasil penelitian Soegiastuti (2015) menemukan bahwa persaingan antar KAP berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil penelitian Laurensius (2016) dan Sukamdani (2016) menunjukkan bahwa kompetisi antar KAP tidak berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Hasil penelitian Nida (2014) menyatakan kompetisi antar KAP berpengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), *audit fee* adalah imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Independensi penampilan auditor dapat dipengaruhi oleh besarnya *fee* audit atas pekerjaan audit yang dilaksanakannya. Semakin tinggi tingkat kompleksitas audit dan risiko audit akan membutuhkan struktur biaya audit yang tinggi. Semakin besar ukuran KAP juga akan meningkatkan struktur biaya dari KAP tersebut karena KAP tersebut memperkerjakan auditor dengan tingkat kompetensi dan menerapkan pengendalian mutu yang tinggi untuk menjaga kualitas auditnya. Semakin besarnya struktur biaya KAP akan membuat *audit fee* semakin meningkat. Dengan terpenuhinya hal itu maka auditor dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan penerapan prosedur audit yang lebih seksama seperti menerapkan teknologi informasi atau memperoleh sampel pemeriksaan yang lebih luas sehingga auditor dapat memberikan jasa audit dengan maksimal. Dengan ini pun auditor sadar kalau ia harus profesional dalam pelaksanaan audit. Tingkat kinerja auditor dalam mengaudit perusahaan klien tidak boleh berdasarkan pada besar *audit fee* karena ia sadar bahwa ia diberi kepercayaan untuk memeriksa laporan keuangan klien demi melayani kepentingan umum. Auditor harus tetap

menjaga integritasnya sebagai pemegang kepercayaan kepentingan umum. Meningkatnya sikap profesional dan integritas auditor pun akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik akan kinerja audit auditor sehingga pandangan pihak ketiga yang meragukan profesionalitas dan integritas auditor akan semakin berkurang. Maka dari itu, semakin tingginya audit *fee* maka independensi penampilan auditor juga semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soegiastuti (2015), Sukamdani (2016), dan Paramastri & Suputra (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif antara audit *fee* terhadap independensi penampilan akuntan publik. Hasil penelitian Aditama (2015), Laurensius (2016), dan Darmayanthi (2017) menyatakan besarnya audit *fee* berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan auditor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darmayanthi (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Penelitian ini menambahkan variabel kompetisi antar KAP yang mengacu pada penelitian Sukamdani (2016) dan variabel pemberian jasa lain selain audit yang mengacu pada penelitian Paramastri (2016). Penelitian ini tidak menggunakan variabel sifat *machiavellian*. Sifat *machiavellian* merupakan sifat mementingkan hasil ketimbang proses, praktik politik oportunistik, tidak mengindahkan moralitas, agama, dan hanya berfokus pada bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara (Yulianto, 2017).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah senior auditor yang bekerja di KAP yang berlokasi di daerah Tangerang dan Jakarta sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan auditor yang bekerja di KAP yang berlokasi di daerah Bali.

3. Tahun Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tahun 2020, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan tahun 2017.

4. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Aji (2012) untuk variabel independensi penampilan auditor, ikatan kepentingan keuangan, dan kompetisi antar KAP. Penelitian ini juga menggunakan kuesioner dari Abdullah (2013) untuk variabel pemberian jasa lain selain audit, kuesioner dari Kelvin (2017) untuk variabel etika profesi, dan kuesioner dari Susanti (2017) untuk variabel *audit fee*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Ikatan Kepentingan Keuangan, Pemberian Jasa Lain Selain Audit, Etika Profesi, Kompetisi antar KAP, dan Audit *Fee* terhadap Independensi Penampilan Auditor”**.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, batasan masalah ini adalah:

1. Objek penelitian ini adalah senior auditor yang bekerja di KAP yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang, telah bekerja sebagai auditor minimal selama 1 tahun, dan memiliki latar pendidikan minimal S1 Akuntansi.
2. Penelitian ini juga membatasi masalah dengan melihat pengaruh ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain selain audit, etika profesi, kompetisi antar KAP dan audit *fee* terhadap independensi penampilan auditor.
3. Periode penelitian adalah 2020.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ikatan kepentingan keuangan berpengaruh negatif terhadap independensi penampilan auditor?
2. Apakah pemberian jasa lain selain audit berpengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor?
3. Apakah etika profesi berpengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor?
4. Apakah kompetisi antar KAP berpengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor?
5. Apakah audit *fee* berpengaruh positif terhadap independensi penampilan auditor?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif ikatan kepentingan keuangan terhadap independensi penampilan auditor.
2. Pengaruh positif pemberian jasa lain selain audit terhadap independensi penampilan auditor.
3. Pengaruh positif etika profesi terhadap independensi penampilan auditor.
4. Pengaruh positif kompetisi antar KAP terhadap independensi penampilan auditor.
5. Pengaruh positif audit *fee* terhadap independensi penampilan auditor.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi auditor tentang betapa pentingnya independensi, khususnya independensi penampilan, agar auditor dapat terus menjaga profesionalitas dan objektivitasnya selama menjalani perikatan audit.

2. Pengguna laporan keuangan auditan

Melalui penelitian ini diharapkan pengguna laporan keuangan paham tentang betapa pentingnya peran serta pengguna laporan keuangan dalam menilai

objektivitas dan profesionalitas auditor dalam memeriksa keandalan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan.

3. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran dan pengembangan untuk penelitian yang lebih luas lagi.

4. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran mengenai faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan yang digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah penelitian, yaitu definisi ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain selain audit, etika profesi, kompetisi antar KAP, audit *fee*, dan independensi penampilan auditor dari berbagai literatur. Bab ini juga menguraikan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain selain audit, etika profesi, kompetisi antar KAP, dan audit *fee*, terhadap independensi penampilan auditor. Di dalamnya dijelaskan mengenai gambaran objek penelitian yaitu KAP dengan auditor sebagai responden, metode penelitian yaitu *causal study*, variabel penelitian, teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, teknik pengumpulan sampel dengan metode *non probability sampling* dan teknikya adalah *convenience sampling*, dan teknik analisis data yaitu dengan statistik deskriptif serta alat uji yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.